

ANALISIS INSTITUSIONALISASI PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (STUDI KASUS DPD PARTAI DEMOKRAT PROVINSI LAMPUNG)

Sidik Firmadi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: Firmadisidik@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kajian tentang analisis institusionalisasi partai politik pada pileg tahun 2014, dengan mengambil studi kasus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Menjelang pemilu legislatif tahun 2014 banyak elit Partai Demokrat melakukan korupsi, sehingga membuat citra Partai Demokrat menjadi buruk yang berdampak pada perolehan suara partai yang menurun. Perolehan suara Partai Demokrat Provinsi Lampung juga mengalami penurunan pada pileg tahun 2014, namun penurunan perolehan suara tersebut masih cukup stabil. Kestabilan perolehan suara merupakan salah satu ciri institusionalisasi partai. Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat dua pertanyaan dalam tesis ini yaitu: 1). Bagaimana tingkat institusionalisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. 2). Apakah perolehan suara Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pileg tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor institusionalisasi partai atau dipengaruhi oleh faktor lain seperti patronase dan klientelisme.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat diperoleh data primer maupun data sekunder. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1).Tingkat institusionalisasi Partai Demokrat Provinsi Lampung berada dalam kategori sedang dengan nilai (1,19). 2). Terdapat kelemahan yang merata dalam setiap dimensi dari institusionalisasi Partai Demokrat Provinsi Lampung. 3). Kestabilan perolehan suara Partai Demokrat Provinsi Lampung tidak semata-mata dipengaruhi oleh institusionalisasi, tetapi dipengaruhi oleh dua faktor lain yang lebih dominan yaitu pilgub dan pileg yang dilaksanakan secara bersamaan, serta praktek patronase dan klientelisme. Rekomendasi atau saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah Partai Demokrat Provinsi Lampung hendaknya segera memperbaiki berbagai kekurangan dalam setiap dimensi Institusionalisasi, seperti jumlah kekuatan anggota atau kader, serta memperkuat organisasi sayap partai, sehingga kedepan potensi dari kekuatan anggota atau kader dan organisasi sayap partai dapat berjalan lebih maksimal.

Kata kunci: institusionalisasi partai politik; patronase dan klientelisme politik dalam pemilu.

PENDAHULUAN

Beberapa tahun menjelang pemilu tahun 2014 citra Partai Demokrat sangatlah buruk dimata masyarakat, hal itu dikarenakan banyak elit Partai Demokrat yang

melakukan korupsi seperti M. Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng, dan Anas Urbaningrum. Objek dalam penelitian ini adalah DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pileg tahun 2014 berhasil memperoleh suara sebesar 11,81% atau 11 kursi DPRD di Provinsi Lampung dan menempati posisi kedua perolehan kursi terbanyak, meskipun jika dibandingkan tahun 2009 perolehan kursi partai turun sebanyak 3 kursi. Merosotnya perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Lampung, tidaklah terlalu buruk jika dibandingkan dengan perolehan kursi di empat daerah lain.

Partai Demokrat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 mendapatkan 16 kursi DPRD¹, sedangkan tahun 2014 Partai Demokrat hanya mendapatkan 9 kursi DPRD Jawa Tengah². Penurunan perolehan kursi DPRD di Provinsi Jawa Barat yang dialami Partai Demokrat juga sangat jauh merosot, pada tahun 2009 Partai Demokrat mendapat 28 kursi DPRD³, namun pada tahun 2014 Partai Demokrat hanya mendapat 12 kursi DPRD⁴. Partai Demokrat di Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan perolehan kursi DPRD yang cukup banyak, dari perolehan kursi sebanyak 22 kursi pada tahun 2009⁵, namun Partai Demokrat di Jawa Timur pada tahun 2014 hanya memperoleh 13 kursi DPRD⁶. Perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD DKI Jakarta sangat menurun drastis dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2009 Partai Demokrat DKI Jakarta mendapat 32 kursi DPRD⁷, namun pada tahun 2014 Partai Demokrat hanya mendapatkan 10 kursi saja⁸. Berikut ini adalah daftar penurunan kursi DPRD Partai Demokrat di lima provinsi:

Tabel 1.2
Daftar Penurunan Perolehan Kursi DPRD Partai Demokrat

No	Nama Partai/Provinsi	Perolehan Kursi 2009/Status	Perolehan Kursi 2014/Status	Presentase Penurunan
1.	Partai Demokrat/Lampung	14 Kursi/Pemenang	11 Kursi/Peringkat Kedua	21,43%
2.	Partai Demokrat/Jawa Timur	22 Kursi/Pemenang	13 Kursi/Peringkat Empat	40%
3.	Partai Demokrat/Jawa Tengah	16 Kursi/Peringkat Kedua	9 Kursi/Peringkat Enam	43,75%
4.	Partai Demokrat/Jawa Barat	28 Kursi/Pemenang	12 Kursi/Peringkat Empat	57,14%
5.	Partai Demokrat/DKI Jakarta	32 Kursi/Pemenang	10 Kursi/Peringkat Lima	68,75%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

¹ <http://jateng.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/820>

² <http://www.antarajateng.com/detail/jumlah-fraksi-di-dprd-jateng-berkurang-satu.html>

³ <http://diskominfo.jabarprov.go.id/muka-baru-dominasi-anggota-dprd-jabar-periode-2009-2014/#.VWhjSOZSlp0>

⁴ <http://www.rumahpemilu.org/in/read/5800/Perolehan-Kursi-Partai-di-Sejumlah-Daerah>

⁵ <http://regional.kompas.com/read/2009/08/31/09243862/100.anggota.dprd.jatim.dilantik>

⁶ <http://suarapubliknews.net/peristiwa-6/item/2318-100-anggota-dprd-jatim-baru-resmi-dilantik>

⁷ <http://metro.news.viva.co.id/news/read/85258-94 calon anggota dprd dki dilantik>

⁸ <http://www.dprd-dkijakartaprov.go.id/wp/fraksi/fraksidprddkijakartaprov/>

Partai Demokrat Provinsi Lampung cukup kuat serta mapan dalam pemilu, karena tidak mudah bagi sebuah partai politik yang mengalami kemerosotan citra dimata masyarakat untuk bertahan (*survive*) pada pemilu ditengah badai korupsi yang menimpa elit partainya. Kestabilan dalam memperoleh suara atau kursi DPRD merupakan salah satu indikator dari institusionalisasi partai, berdasarkan fenomena tersebut maka akan sangat menarik jika dilakukan penelitian terkait dengan *Analisis Institusionalisasi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung)*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana tingkat institusionalisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung? 2). Apakah perolehan suara DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pileg tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor institusionalisasi partai atau dipengaruhi oleh faktor lain seperti patronase dan klientelisme?. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tingkat institusionalisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. 2). Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi perolehan suara DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pileg tahun 2014. Manfaat penelitian ini adalah: 1). Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan teori institusionalisasi partai politik, teori patronase, dan teori klientelisme politik dalam pemilu. 2). Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada partai politik, khususnya DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, agar kedepan dapat dilakukan berbagai evaluasi terkait dengan institusionalisasi partai.

Kajian atau penelitian tentang institusionalisasi partai politik tentunya bukanlah sesuatu yang baru, beberapa penelitian terdahulu seperti: Penelitian yang dilakukan oleh Akbar Tandjung (2006), yang meneliti tentang *The Golkar Way Survival Partai Golkar Ditengah Turbulensi Politik Era Transisi*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan Partai Golkar dalam bertahan (*survive*), tidak terlepas dari pelembagaan politik yang kuat. Penelitian tentang institusionalisasi partai politik juga dilakukan oleh Budi Prayitno (2009), yang meneliti tentang *Pelembagaan Politik PDIP Jateng*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, derajat Kesisteman PDIP Jateng berada pada derajat yang rendah. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Ainur Rofieq (2009), yang meneliti tentang *Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2009*. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa, dalam proses rekrutmen caleg PKB sudah menggunakan mekanisme yang ditetapkan oleh pengurus partai yang tertuang dalam peraturan partai, didalam peraturan itu tercantum mengenai prinsip, sumber, mekanisme dan tahapan pencalegan, dan sebagainya.

Partai Politik (Parpol), menurut Miriam Budiardjo menulis bahwa:

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai

orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Budiardjo, 2008:403-404).

Institusionalisasi partai politik, Menurut Samuel P. Huntington:

Huntington yang membahas tentang pelebagaan politik menyatakan bahwa agar partai politik *survive* (bertahan), partai tersebut harus memiliki pelebagaan yang kuat. Huntington mendefinisikan pelebagaan politik sebagai proses dimana organisasi dan prosedur memperoleh nilai baku dan stabil. Huntington mengukur tingkat pelebagaan politik ini dari tingkat adaptabilitas, kompleksitas, otonomi, dan koherensi (Dalam Tandjung, 2007:21).

Menurut Basedau dan Stroh pelebagaan partai terdiri dari empat dimensi:

Mereka memodifikasi pelebagaan partai milik Randall dan Svasand, mengacu pada istilah aslinya dalam definisi pelebagaan partai. Mereka menempatkan '*akar di masyarakat*' dalam organisasi masuk dalam dimensi stabilitas pada aspek eksternal, kemudian '*tingkat organisasi*' dalam dimensi stabilitas pada aspek internal. Selanjutnya mereka memasukkan '*otonomi*' dalam dimensi *value infusion* pada aspek eksternal dan '*koherensi*' dalam dimensi *value infusion* pada aspek internal (Basedau dan Stroh 2008:9).

Empat dimensi di atas jika diuraikan adalah sebagai berikut: Dimensi pertama yaitu *Roots in society* (mengakar dalam masyarakat), maksud dari *roots in society* adalah Partai politik ini memiliki akar yang stabil dalam masyarakat. Dimensi kedua yaitu *autonomy* (independen dalam mengambil keputusan), maksud dari otonomi adalah kebebasan partai politik dari pengaruh luar partai dalam mengambil setiap keputusan atau kebijakan partai. Dimensi ketiga yaitu *level of organization* (terdapat alat organisasi yang selalu bekerja untuk kepentingan partai disetiap tingkat kepengurusan), maksud dari *level of organization* adalah kepengurusan ditingkat atas hingga kepengurusan pada tingkat bawahnya bekerja untuk kepentingan partai guna membesarkan partai dan memberikan kemenangan dalam pemilu. Dimensi keempat yaitu *coherence* (kekompakan para anggota partai), maksud dari *coherence* adalah kekompakan para anggota partai dalam parlemen, sehingga tidak terjadi pembelotan dari anggota partai dan tetap berpegang teguh pada kebijakan yang telah diambil oleh partai.

Tabel II.2
Pelebagaan Partai Politik

	Stability	Value Infusion
External	<i>Roots in society</i>	<i>Autonomy</i>
Internal	<i>Level of organization</i>	<i>Coherence</i>

Sumber: Basedau dan Stroh (2008).

Patronase politik, menurut Aspinall dan Sukmajati menulis bahwa:

Patronase politik adalah pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Perlu ditekankan disini bahwa unsur pertukaran dalam patronase terkadang problematik. Ketika kandidat mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih, sebenarnya mereka tidak yakin dengan bentuk respons balik yang akan diberikan oleh pemilih (Aspinall & Sukmajati 2015:22).

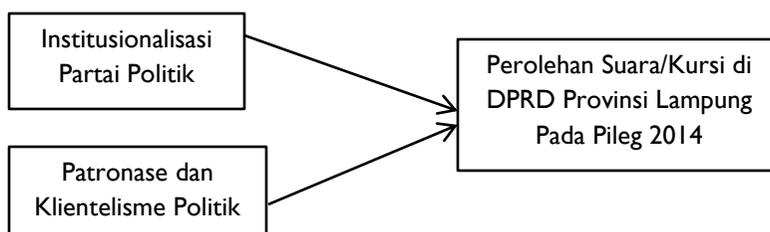
Patronase politik dalam pemilu menurut Aspinall dan Sukmajati memiliki lima model:

Pertama adalah pembelian suara (*vote buying*) yang bermakna, distribusi pembayaran uang tunai/barang dari kandidat kepada pemilih. Patronase kedua dalam pemilu adalah pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*), contoh barang pemberian seperti bahan makanan atau sembako, seperti beras, gula, minyak goreng, dan mie instan. Patronase politik ketiga dalam pemilu adalah pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), contohnya adalah penyelenggaraan pertandingan olah raga, turnamen catur atau domino, forum-forum pengajian, demo memasak, menyanyi bersama, pesta-pesta yang diselenggarakan oleh komunitas dan lain sebagainya. Patronase politik keempat dalam pemilu adalah pemberian barang-barang kelompok (*club goods*), yang berarti pemberian untuk keuntungan bersama bagi kelompok sosial tertentu ketimbang bagi keuntungan individual. Patronase politik kelima dalam pemilu adalah proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*), yang berarti proyek-proyek pemerintah yang ditujukan untuk wilayah geografis tertentu. Karakter utama dari *pork barrel* adalah bahwa kegiatan ini ditujukan kepada publik dan didanai dengan dana publik dengan harapan publik akan memberikan dukungan politik kepada kandidat tertentu. (Aspinall & Sukmajati 2015:24-28).

Menurut Aspinall dan Sukmajati menulis bahwa:

Patronase politik akan berjalan efektif apabila dengan membentuk relasi yang murni klientelistik, dengan demikian relasi ini tidak semata-mata berupa pertukaran material jangka pendek (*one-off material exchange*) antara kandidat dan pemilih, tetapi menjadi bagian pembentukan relasi jangka panjang yang sama-sama menguntungkan dua pihak, pengulangan seperti ini adalah ciri penting dari klientelisme. Para kandidat biasanya memberikan penghargaan kepada para anggota tim sukses, tidak hanya dengan membayar uang, tetapi juga dengan janji untuk memberikan pekerjaan, kontrak, atau keuntungan lainnya (Aspinall & Sukmajati 2015:35).

Gambar. Kerangka Berfikir



Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan (Dalam Moleong, 2011:4).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, menurut Stewart dan Cash:

Wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang didalamnya terdapat pertukaran atau berbagai aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif dan informasi (Dalam Herdiansyah, 2010:118).

Dokumentasi Menurut Herdiansyah:

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2010:143).

Teknik analisis data model Miles Dan Huberman:

Analisis data yang bergerak dalam tiga komponen, yaitu (1) Reduksi Data (*reduction*), (2) Sajian Data (*display*) dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*conclusion drawing*). (Dalam Lisa, Ridvia. 2010. Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman. Padang. Universitas Negeri Padang). Peneliti juga akan melakukan analisis indeks dari institusionalisasi partai untuk menghitung tingkat institusionalisasi Partai Demokrat Provinsi Lampung. Analisis indeks institusionalisasi partai tersebut menggunakan *coding* dengan skala nilai 0-2, dengan nilai interval indeks 0 - 0,66 (rendah), 0,67 - 1,33 (sedang), dan 1,34 - 2,00 (tinggi).

PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Institusionalisasi Partai Demokrat Provinsi Lampung

Dimensi *Roots in society*, 1). Umur partai dibanding umur kemerdekaan: Partai Demokrat Provinsi Lampung berumur 12 tahun, sedangkan negara Indonesia telah berumur 70 tahun. Indikator ini mendapatkan nilai 0, nilai itu didapatkan dari hasil yang telah dihitung oleh peneliti bahwa umur DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung adalah 17,14% dari umur kemerdekaan. 2). Umur partai dibanding era multi partai: Partai Demokrat Provinsi Lampung berumur 12 tahun, sedangkan umur reformasi (era multi partai) adalah 17 tahun. Indikator ini mendapatkan nilai 1, nilai itu didapatkan dari hasil yang telah dihitung oleh peneliti bahwa umur DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung adalah 70,59% dari umur reformasi (era multi partai). 3). Kestabilan dukungan dalam pemilu: Berdasarkan data dari KPUD Provinsi Lampung, DPD Partai Demokrat

Provinsi Lampung mengalami penurunan perolehan suara pada pileg tahun 2014 dibandingkan dengan perolehan suara pada pileg tahun 2009 yaitu sebesar 171.225 suara atau 6,71%. Indikator ini mendapatkan nilai 0, nilai itu didapatkan dari penilaian bahwa perolehan suara masuk dalam kategori minus. 4). Jaringan dengan ormas: Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung memiliki organisasi sayap yaitu Pemuda Demokrat dan Perempuan Demokrat. Indikator ini mendapatkan nilai 2. Untuk menganalisis nilai dari masing-masing indikator, peneliti menggunakan rumus mean (rata-rata), dengan cara jumlah nilai indikator dibagi dengan jumlah kategori indikator. Berdasarkan hasil penghitungan Partai Demokrat Provinsi Lampung, dari dimensi *roots in society* termasuk dalam kategori sedang dengan perolehan nilai sebesar 0,75 (sedang).

Dimensi *autonomy*, 1). Pergantian pimpinan partai: Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), dikatakan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung telah melakukan pergantian pimpinan partai sebanyak tujuh kali. Indikator ini mendapatkan nilai 0, karena tidak sesuai perodesasi (5 tahun). 2). Kestabilan dukungan politik pasca pergantian pimpinan partai: Berdasarkan data dari KPUD Provinsi Lampung terjadi penurunan perolehan suara sebesar 171.225 atau sebesar 6,71%, indikator ini mendapatkan nilai 2, nilai itu didapatkan dari penilaian bahwa penurunan suara tidak mencapai 10%. 3). Otonomi pengambilan keputusan: Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), beliau mengatakan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung tergantung pada ketua DPD hanya saat-saat tertentu saja. Indikator ini mendapatkan nilai 1. 4). Apresiasi dari pihak tertentu: Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), beliau mengatakan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung tidak mendapatkan apresiasi berupa dukungan politik dari pihak diluar partai. Indikator ini mendapatkan nilai 0. Untuk menganalisis nilai dari masing-masing indikator, peneliti menggunakan rumus mean (rata-rata), dengan cara jumlah nilai indikator dibagi dengan jumlah kategori indikator. Berdasarkan hasil penghitungan Partai Demokrat Provinsi Lampung, dari dimensi *autonomy* termasuk dalam kategori sedang dengan perolehan nilai sebesar 0,75 (sedang).

Dimensi *level of organization*, 1). Kekuatan Anggota: Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Holidi (ketua BURT DPD PD Provinsi Lampung), beliau mengatakan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung memiliki jumlah anggota/kader sebanyak 25.500 orang. Jika dibandingkan dengan perolehan suara pada pileg tahun 2014 sebesar 484.152 atau 11,81%, indikator ini mendapatkan nilai 0. Nilai itu didapatkan dari perbandingan bahwa jumlah anggota/kader partai tidak mencapai 10% dari jumlah perolehan suara. 2). Keteraturan kongres: Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), beliau mengatakan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung memiliki jadwal Musyawarah Daerah (Musda) yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam lima tahun. Indikator ini mendapatkan nilai 2. 3). Sumber daya personal dan material: Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), beliau mengatakan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung telah

memiliki sumber daya personal maupun material yang cukup dan memadai, indikator ini mendapatkan nilai 1. 4). Tingkat koordinasi dengan partai secara nasional: Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), beliau mengatakan bahwa DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung telah melaksanakan koordinasi ditingkat daerah sesuai dengan peraturan partai. Indikator ini mendapatkan nilai 2. Untuk menganalisis nilai dari masing-masing indikator, peneliti menggunakan rumus mean (rata-rata), dengan cara jumlah nilai indikator dibagi dengan jumlah kategori indikator. Berdasarkan hasil penghitungan Partai Demokrat Provinsi Lampung, dari dimensi *level of organization* termasuk dalam kategori sedang dengan perolehan nilai sebesar 1,25 (sedang).

Dimensi coherence, 1). Koherensi di parlemen: Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), beliau mengatakan bahwa tidak pernah ada anggota DPRD dari fraksi Partai Demokrat yang mundur. Indikator ini mendapatkan nilai 2. 2). Kekompakan partai: Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), beliau mengatakan bahwa memang terjadi faksi-faksi antar anggota/kader partai terutama pada saat pemilihan pimpinan partai, tetapi faksi-faksi tersebut kemudian dapat dipersatukan lagi setelah pemilihan selesai. Indikator ini mendapatkan nilai 2. 3). Toleransi dalam partai: Berdasarkan data hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (sekretaris DPD PD Provinsi Lampung), beliau mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung membebaskan setiap anggota/kadernya untuk berpendapat. Indikator ini mendapatkan nilai 2. Untuk menganalisis nilai dari masing-masing indikator, peneliti menggunakan rumus mean (rata-rata), dengan cara jumlah nilai indikator dibagi dengan jumlah kategori indikator. Berdasarkan hasil penghitungan Partai Demokrat Provinsi Lampung, dari dimensi *coherence* termasuk dalam kategori sedang dengan perolehan nilai sebesar 2 (tinggi).

Hasil analisis indeks institusionalisasi di atas menunjukkan bahwa tingkat institusionalisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung bervariasi untuk tiap-tiap dimensi dari institusionalisasi, seperti pada dimensi *roots in society* dengan nilai 1,25 (sedang), *autonomy* mendapatkan nilai 0,75 (sedang), *level of organization* mendapatkan nilai 1,25 (sedang), dan *coherence* mendapatkan nilai 2 (tinggi). Nilai untuk masing-masing dimensi dari teori institusionalisasi partai politik di atas, selanjutnya akan dihitung serta dianalisis sehingga akan didapatkan nilai dari keseluruhan dimensi tersebut dengan menggunakan rumus mean (rata-rata), dengan cara jumlah nilai dimensi dibagi dengan jumlah kategori dimensi. Berdasarkan hasil penghitungan dari seluruh nilai dimensi didapatkan hasil bahwa tingkat institusionalisasi Partai Demokrat Provinsi Lampung berada dalam kategori sedang dengan nilai 1,19.

Analisis Perolehan Suara Partai Demokrat Provinsi Lampung Pada Pileg Tahun 2014

Kestabilan perolehan suara Partai Demokrat Provinsi Lampung Pada pileg tahun 2014 tidak semata-mata dipengaruhi oleh institusionalisasi partai, akan tetapi berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fajrul Najah Ahmad (Sekretaris DPD PD Provinsi Lampung) terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi

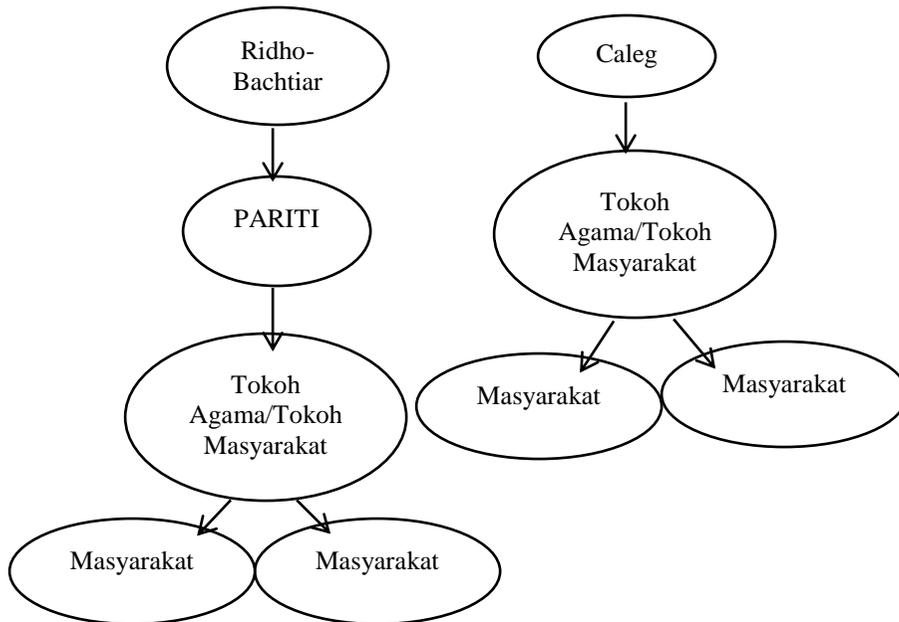
kestabilan perolehan suara partai yaitu: 1). pelaksanaan pemilihan gubernur (pilgub) yang bersamaan dengan pemilihan legislatif (pileg). 2). strategi kampanye calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Demokrat pada pileg tahun 2014.

Strategi kampanye pasangan Ridho-Bachtiar menurut peneliti mencerminkan praktek patronase dan klientelisme politik dalam pemilu, sebagai bukti adanya acara menonton pertunjukkan wayangan (menyasar kelompok Jawa) yang dilakukan oleh "Paguyuban Ridho Berbakti" (PARITI) yang merupakan tim sukses pasangan Ridho-Bachtiar dalam pilgub. Pelaksanaan acara nonton bareng wayangan yang dilakukan oleh PARITI tersebut adalah merupakan bentuk patronase politik yang masuk dalam kategori pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), karena menonton wayangan sama saja dengan memberikan pelayanan berupa hiburan kepada masyarakat selain itu terdapat pula patronase dalam bentuk pemberian-pemberian pribadi (*individual gifts*) seperti pemberian sembako. Pemberian sembako tersebut juga dilakukan melalui tokoh masyarakat maupun tokoh agama sebagai *broker* (klientelisme) guna mengaktifkan patronase yang telah diberikan.

Strategi kampanye yang cenderung mengarah pada praktek patronase dan klientelisme juga dilakukan pula oleh caleg dari Partai Demokrat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yandri Nazir dan Bapak M. Junaidi (Caleg Partai Demokrat). Strategi yang dilakukan adalah dengan cara mengadakan perlombaan olah raga seperti lomba sepak bola, bola voli, dan lain sebagainya, hal ini merupakan bentuk patronase pelayanan dan aktivitas (*services and activities*), dalam melaksanakan perlombaan olah raga tersebut Bapak Yandri Nazir menggunakan jaringan *broker* (klientelisme) yaitu dengan cara bekerjasama dengan ketua pemuda (karang taruna) pada setiap desa. Bentuk patronase yang lain adalah dengan melakukan proyek-proyek gentong babi (*pork barrel projects*), dengan cara mengusulkan pembangunan SMA dan penambahan tenaga kesehatan (dokter) di wilayah tertentu (dapil caleg yang bersangkutan). Bentuk patronase yang dilakukan oleh Bapak M. Junaidi yaitu pemberian-pemberian barang pribadi (*individual gifts*), seperti mukena, peci, sarung, korek api, sabun colek, dan lain sebagainya, barang-barang tersebut biasanya diberikan melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat di setiap desa yang dikunjungi sebagai bagian jaringan *broker* (klientelisme). Patronase kedua yaitu adalah bentuk patronase yang memberikan pelayanan dan aktivitas (*services and activities*) dengan cara membawa artis (Kiki The Poters) sebagai bentuk memberikan layanan hiburan kepada masyarakat.

Gambar V.1

Pola Klientelisme Dalam Pilgub dan Pileg



KESIMPULAN

Kesimpulan: 1). Tingkat Institusionalisasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Lampung, berada dalam kategori sedang dengan nilai (1,19). 2). Perolehan suara Partai Demokrat Provinsi Lampung dalam pemilihan legislatif, tidak semata-mata dipengaruhi oleh institusionalisasi partai melainkan terdapat faktor lain yang lebih dominan yaitu pelaksanaan pilgub dengan pileg yang bersamaan dan strategi caleg. Strategi kampanye dalam pilgub maupun dalam pileg yang dijalankan semuanya cenderung berbentuk patronase dan klientelisme, dengan begitu maka teori institusionalisasi partai politik di Indonesia pada umumnya serta Provinsi Lampung pada khususnya, belum menjadi faktor penentu kestabilan perolehan suara partai dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

Aspinall, Edward dan Sukmajati, Mada. 2015. *Politik Uang Di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*, Yogyakarta, PolGov UGM.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif : untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta, Salemba Humanika.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung. PT Remaja Rosdakarya.

Tandjung, Akbar 2007. *The Golkar Way Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.

Basedau, Matthias and Stroh, Alexander. *Measuring Party Institutionalization in Developing Countries: A New Research Instrument Applied to 28 African Political Parties*, GIGA Research Programme: Legitimacy and Efficiency of Political Systems. Number 69, February 2008.

Lisa, Ridvia. 2010. *Analisis Data Kualitatif Model Miles Dan Huberman*, Padang, Universitas Negeri Padang.

Prayitno, Budi 2009. *Pelembagaan Politik PDIP Jateng*, Tesis Universitas Diponegoro Semarang.

Rofieq, Ainur 2009. *Fungsi Rekrutmen Politik Pada Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2009*, Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam 45 Bekasi

<http://diskominfo.jabarprov.go.id/muka-baru-dominasi-anggota-dprd-jabar-periode-2009-2014/#.VWhjS0ZSlp0>

<http://www.rumahpemilu.org/in/read/5800/Perolehan-Kursi-Partai-di-Sejumlah-Daerah>

<http://www.antarajateng.com/detail/jumlah-fraksi-di-dprd-jateng-berkurang-satu.html>

<http://jateng.bps.go.id/webbeta/frontend/linkTabelStatis/view/id/820>

<http://suarapubliknews.net/peristiwa-6/item/2318-100-anggota-dprd-jatim-baru-resmi-dilantik>

<http://regional.kompas.com/read/2009/08/31/09243862/100.anggota.dprd.jatim.dilantik>

<http://www.dprd-dkijakartaprof.go.id/wp/fraksi/fraksidprddkijakartaprof/>

http://metro.news.viva.co.id/news/read/85258-94_calon_anggota_dprd_dki_dilantik

Lampiran

Tabel. Indeks Institusionalisasi Partai Politik

Dimensi	No.	Kriteria	Indikator	Coding
Roots in society	1.	Umur partai dibanding umur kemerdekaan	Prosentase dari umur partai dibanding umur negara	0 =< 50 % 1 = 50% - 90 % 2 => 90 %
	2.	Umur partai dibanding era multi partai	Prosentase umur partai dibanding umur reformasi (era multi partai)	0 =< 50 % 1 = 50% - 90 % 2 => 90 %
	3.	Kestabilan dukungan pemilu	Prosentase perolehan suara dalam pemilu terakhir dibanding pemilu sebelumnya	Kekalahan: -1 = < 50 % 0 = 10% - 50 % 2 =< 10 % Kemenangan: 0 = < 10 % 1 = 10 – 50 % 2 = > 50 %
	4.	Jaringan ormas	Jumlah jaringan ormas	0 = tidak ada 1 = ada tetapi tidak terorganisir 2 = ada dan terorganisir
Autonomy	1.	Pergantian pimpinan partai	Jumlah pergantian pimpinan partai	0 = tidak ada 1 = 1 2 => 2
	2.	Kestabilan dukungan politik pasca pergantian pimpinan partai	Prosentase perolehan suara setelah pergantian dibanding sebelumnya	Kekalahan: -1 = < 50 % 0 = 10% - 50 % 2 = < 10 % Kemenangan: 0 = < 10 % 1 = 10 – 50 % 2 = > 50 %
	3.	Otonomi pengambilan keputusan	Ketergantungan partai pada figur personal dalam pengambilan keputusan (dari data kualitatif)	0 = tergantung figur sepenuhnya 1 = tergantung dalam hal tertentu 2 = tidak tergantung figur
	4.	Apresiasi dari pihak tertentu	Apresiasi yang diberikan oleh organisasi diluar	0 = tidak ada apresiasi 1 = sedikit apresiasi

			partai berupa dukungan politik (secara kualitatif)	2 = banyak mendapat apresiasi
Level of organization	1.	Kekuatan anggota	Jumlah yang mempunyai kartu anggota dibanding perolehan suara	0 =< 10 % 1 = 10 – 50 % 2 = > 50 %
	2.	Keteraturan kongres	Jadwal kongres	0 = tidak ada, tidak terjadwal 1 = ada bila ada permasalahan 2 = ada secara teratur
	3.	Sumber daya personal dan material	Jumlah sumber daya (manusia, peralatan kantor, dana) secara kualitatif dan kuantitatif	0 = sedikit (kurang) 1 = cukup 2 = banyak (berlimpah)
	4.	Koordinasi dan pertemuan partai tingkat nasional	Tingkat koordinasi dengan partai secara nasional	0 = sangat jarang 1 = kadang-kadang 2 = sering, terjadwal
Coherence	1.	Koherensi di parlemen	Jumlah anggota parlemen yang mundur karena konflik	0 = > 2 orang 1 = 1 orang 2 = tidak ada
	2.	Kekompakan partai	Jumlah faksi dalam partai dan kekompakan	0 = terpecah 1 = ada faksi, tidak terpecah 2 = tidak ada faksi
	3.	Toleransi dalam partai	Tingkat konflik dalam partai	0 = ada pengusiran 1 = ada ancaman 2 = kebebasan berekspresi

Sumber: Basedau dan Stroh (2008).